



ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

Rahmat Nurjaman, S.Sos., M.Si



ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

Rahmat Nurjaman, S.Sos., M.Si



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

Penulis:

Rahmat Nurjaman, S.Sos., M.Si

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Tahta Media

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

vi, 62, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN : 978-623-147-840-5

Cetakan Pertama:

Mei 2025

Hak Cipta 2025, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2025 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, sehingga buku ini, yang berjudul "Analisis Kebijakan Publik," dapat diselesaikan dan disajikan kepada pembaca. Buku ini hadir sebagai respon terhadap kebutuhan akan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai analisis kebijakan publik, sebuah disiplin yang semakin relevan dengan perkembangan zaman dan kompleksitas isu-isu yang dihadapi masyarakat saat ini.

Kebijakan publik merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mampu memengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, perubahan iklim, ketidakadilan sosial dan dinamika politik, pemimpin, pembuat kebijakan dan akademisi dituntut untuk mampu menganalisis, merumuskan, dan mengevaluasi kebijakan dengan baik agar dapat menghasilkan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai proses dan teori analisis kebijakan publik, serta instrumen dan metode yang dapat digunakan dalam praktik kebijakan.

Melalui penyajian teori-teori dasar, model-model analisis, serta evaluasi kebijakan publik, kami berharap pembaca dapat membangun pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami dan terlibat dalam proses kebijakan publik. Kami berharap buku ini dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa, peneliti, praktisi, dan siapa pun yang tertarik untuk memahami lebih jauh tentang dunia kebijakan publik.

Penyusunan buku ini tidak lepas dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif selama proses penulisan. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang signifikan dan menjadi inspirasi bagi upaya-upaya pengembangan kebijakan publik yang lebih baik di masa mendatang.

Akhir kata, kami berharap buku ini dapat memberikan wawasan baru dan mendalam bagi pembaca serta menjadi alat bantu dalam upaya menciptakan kebijakan yang lebih responsif dan bertanggung jawab.

Jayapura, 16 Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	IV
DAFTAR ISI	VI
BAB 1 PENGANTAR KEBIJAKAN PUBLIK.....	1
A. DEFINISI KEBIJAKAN PUBLIK	1
B. PENTINGNYA KEBIJAKAN PUBLIK	3
C. JENIS-JENIS KEBIJAKAN PUBLIK	4
BAB 2 PROSES KEBIJAKAN PUBLIK	8
A. IDENTIFIKASI MASALAH.....	8
B. PENETAPAN AGENDA	10
C. FORMULASI KEBIJAKAN	11
D. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN.....	13
D. EVALUASI KEBIJAKAN.....	16
BAB 3 TEORI DAN MODEL ANALISIS KEBIJAKAN.....	20
A. MODEL RASIONAL	20
B. MODEL INCREMENTAL	23
C. MODEL KELEMBAGAAN	24
D. MODEL KONSTRUKTIVIS	26
E. TEORI BERBASIS JARINGAN.....	27
BAB 4 METODE ANALISIS KEBIJAKAN.....	30
A. ANALISIS KUANTITATIF.....	30
B. ANALISIS KUALITATIF.....	31
C. ANALISIS MULTI-KRITERIA	34
D. PEMODELAN DAN SIMULASI	35
BAB 5 PARTISIPASI PUBLIK DALAM KEBIJAKAN.....	39
A. PENTINGNYA PARTISIPASI PUBLIK	39
B. METODE PARTISIPASI PUBLIK	42
C. TANTANGAN DALAM PARTISIPASI PUBLIK.....	45
BAB 6 EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK	48
A. TUJUAN EVALUASI	48
B. METODE EVALUASI	50
C. KRITERIA EVALUASI.....	53
D. MENANGGAPI HASIL EVALUASI.....	55
DAFTAR PUSTAKA	59
PROFIL PENULIS.....	62

BAB 1

PENGANTAR KEBIJAKAN PUBLIK

A. DEFINISI KEBIJAKAN PUBLIK

1. Pengantar

Kebijakan publik merupakan instrumen fundamental dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan masyarakat. Di dalamnya tercermin proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama, mengalokasikan sumber daya, serta menjawab berbagai persoalan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan.

2. Definisi Kebijakan Publik

Secara umum, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian keputusan, tindakan, atau tidak bertindak (non-decision) yang diambil oleh aktor-aktor pemerintahan yang memiliki otoritas, dan yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat luas.

Beberapa definisi dari para ahli:

- **Thomas R. Dye (1972):** “Public policy is whatever governments choose to do or not to do.” (Kebijakan publik adalah apa pun yang diputuskan atau tidak diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan).
- **James E. Anderson (1975):** “Public policy is a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern.” (Kebijakan publik adalah suatu rangkaian tindakan yang terarah dan dilakukan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor dalam menangani suatu masalah).

BAB 2

PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

A. IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam proses perumusan kebijakan publik, langkah pertama dan paling krusial adalah identifikasi masalah. Tanpa pemahaman yang tepat mengenai masalah yang dihadapi, kebijakan yang dihasilkan cenderung tidak efektif, bahkan bisa menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan. Identifikasi masalah bukan sekadar mengenali adanya gejala sosial, melainkan upaya sistematis untuk menggali akar persoalan, memahami konteksnya, dan menentukan ruang lingkup intervensi kebijakan.

1) Definisi dan Tujuan Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam konteks kebijakan publik dapat diartikan sebagai proses awal untuk menemukan dan merumuskan isu-isu yang memerlukan perhatian pemerintah atau pemangku kepentingan lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk:

- Menyaring persoalan yang benar-benar penting dan mendesak.
- Menentukan urgensi dan relevansi isu terhadap kepentingan publik.
- Menyediakan dasar rasional dalam proses formulasi kebijakan.

Masalah yang teridentifikasi dengan baik akan membuka jalan bagi analisis yang lebih akurat dan pengambilan keputusan yang tepat sasaran.

2) Sumber-Sumber Identifikasi Masalah

Masalah publik dapat diidentifikasi melalui berbagai sumber, antara lain:

- **Data empiris:** Statistik sosial, hasil survei, laporan penelitian, dan data administratif menjadi dasar kuat dalam mengenali tren dan pola masalah yang muncul.
- **Keluhan masyarakat:** Aspirasi publik yang disampaikan melalui media, forum diskusi, atau mekanisme pengaduan bisa menjadi

BAB 3

TEORI DAN MODEL

ANALISIS KEBIJAKAN

A. MODEL RASIONAL

Dalam kajian kebijakan publik, Model Rasional merupakan salah satu pendekatan paling awal dan klasik yang digunakan untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan oleh aktor-aktor kebijakan. Model ini menekankan rasionalitas, efisiensi, dan penggunaan logika sistematis dalam menyusun dan memilih alternatif kebijakan yang paling optimal. Pendekatan ini banyak dipengaruhi oleh teori ekonomi klasik dan teori pengambilan keputusan (decision theory), yang mengasumsikan bahwa pembuat kebijakan memiliki informasi lengkap dan kemampuan analisis yang memadai.

a) Definisi dan Asumsi Dasar

Model Rasional dalam analisis kebijakan didefinisikan sebagai suatu pendekatan pengambilan keputusan yang dilakukan secara sistematis dan logis, berdasarkan perhitungan untung-rugi dari setiap alternatif kebijakan yang tersedia. Tujuan utama dari model ini adalah untuk memilih alternatif yang maksimal dalam manfaat dan minimal dalam biaya (efisiensi optimal).

Beberapa asumsi dasar dari Model Rasional meliputi:

- Terdapat tujuan yang jelas dan dapat diukur.
- Semua alternatif kebijakan dapat diidentifikasi dan dianalisis.
- Dampak dari setiap alternatif dapat diprediksi secara akurat.
- Pembuat kebijakan memiliki informasi lengkap dan objektif.
- Pemilihan alternatif dilakukan berdasarkan kriteria rasional, bukan kepentingan politik atau nilai subjektif.

BAB 4

METODE ANALISIS

KEBIJAKAN

A. ANALISIS KUANTITATIF

Dalam ranah analisis kebijakan publik, analisis kuantitatif memegang peranan penting sebagai instrumen untuk memahami, mengevaluasi, dan memprediksi dampak dari suatu kebijakan secara objektif dan terukur. Pendekatan ini bertumpu pada data numerik, statistik, dan model matematis guna menghasilkan simpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis kuantitatif digunakan dalam berbagai tahap siklus kebijakan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi dampak kebijakan. Misalnya, untuk menilai efektivitas program bantuan sosial, analisis kebijakan dapat membandingkan kondisi ekonomi rumah tangga penerima bantuan sebelum dan sesudah program dijalankan menggunakan metode statistik seperti *difference-in-differences* atau regresi multivariat.

Salah satu kekuatan utama dari pendekatan kuantitatif adalah kemampuannya untuk mengendalikan variabel pengganggu dan mengisolasi hubungan kausal. Penggunaan data survei, data administratif pemerintah, hingga big data memungkinkan analisis dilakukan secara luas dan dalam skala besar. Metode ini sangat penting dalam menjawab pertanyaan "seberapa besar dampak sebuah kebijakan?", "siapa yang paling terdampak?", dan "apakah intervensi ini lebih efektif dibandingkan alternatif lain?".

Namun demikian, pendekatan ini memiliki keterbatasan. Tidak semua fenomena kebijakan dapat diukur secara numerik. Dimensi sosial, budaya, dan politik sering kali tidak sepenuhnya tercermin dalam angka. Oleh karena itu, analisis kuantitatif perlu dilengkapi dengan pendekatan kualitatif agar

BAB 5

PARTISIPASI PUBLIK

DALAM KEBIJAKAN

A. PENTINGNYA PARTISIPASI PUBLIK

Dalam kajian kebijakan publik, partisipasi publik menempati posisi sentral yang tidak dapat diabaikan. Sebuah kebijakan yang baik bukan hanya produk pemikiran para ahli atau pejabat pemerintahan, melainkan hasil dari dialog, aspirasi, dan keterlibatan aktif warga negara. Partisipasi publik bukan sekadar pelengkap prosedural; ia merupakan unsur esensial yang menentukan legitimasi, efektivitas, dan keberlanjutan suatu kebijakan.

1) Definisi dan Hakikat Partisipasi Publik

Partisipasi publik merujuk pada keterlibatan individu atau kelompok dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan bersama. Keterlibatan ini bisa berbentuk konsultasi, pemberian masukan, advokasi, hingga pengawasan terhadap implementasi kebijakan. Dalam demokrasi modern, partisipasi diakui sebagai hak warga negara sekaligus sebagai mekanisme untuk memperbaiki kualitas pemerintahan.

Menurut Arnstein (1969) dalam karyanya yang terkenal *A Ladder of Citizen Participation*, partisipasi dapat dipahami sebagai spektrum, mulai dari manipulasi (partisipasi semu) hingga kontrol warga penuh atas keputusan. Dengan demikian, penting untuk tidak hanya melihat kuantitas partisipasi, tetapi juga kualitasnya.

2) Alasan Pentingnya Partisipasi Publik

a. Meningkatkan Legitimasi Kebijakan

Kebijakan yang disusun dengan melibatkan publik cenderung memiliki legitimasi yang lebih tinggi. Warga merasa bahwa suara mereka dihargai, sehingga lebih cenderung menerima dan

BAB 6

EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

A. TUJUAN EVALUASI

Dalam bidang analisis kebijakan publik, evaluasi merupakan tahap yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan siklus kebijakan. Evaluasi bertujuan menilai sejauh mana suatu kebijakan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta memberikan masukan untuk perbaikan atau pengembangan kebijakan di masa mendatang. Tanpa evaluasi, pengambilan keputusan hanya akan didasarkan pada asumsi atau persepsi semata, bukan pada bukti nyata yang terukur.

Secara umum, tujuan evaluasi dalam kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi lima tujuan utama: (1) mengukur efektivitas, (2) meningkatkan akuntabilitas, (3) memperbaiki implementasi, (4) mendukung pengambilan keputusan, dan (5) menghasilkan pembelajaran institusional. Mari kita uraikan satu per satu.

1. Mengukur Efektivitas Kebijakan

Tujuan pertama evaluasi adalah untuk mengukur efektivitas suatu kebijakan. Ini berarti mengevaluasi sejauh mana kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apakah intervensi publik yang dirancang benar-benar menyelesaikan masalah yang menjadi fokus perhatian? Misalnya, jika sebuah program kesehatan masyarakat bertujuan untuk menurunkan angka kematian bayi, evaluasi harus mampu menunjukkan apakah angka tersebut memang menurun dan sejauh mana penurunannya dapat dikaitkan dengan program tersebut.

Pengukuran efektivitas tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga memperhatikan proses yang ditempuh dan faktor-faktor kontekstual yang

DAFTAR PUSTAKA

- CAHYADI, A., LATIFAH, P., RESTY, M., & MUNAWAROH, Z. JENIS-JENIS PENDEKATAN DALAM STUDI KEBIJAKAN SEKTOR PUBLIK.
- Chasanah, K., Rosyadi, S., & Kurniasih, D. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 12-32.
- Febrianti, N. A., Devi, A. S., Arifah, A. S., Maulidina, N. D., Putri, M. R., Arum, B. M., & Angin, R. (2024). EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK. *Consilium: Education and Counseling Journal*, 5(1), 85-93.
- Fischer, F., Miller, G. J., & Baihaqi, I. (2021). *Penggunaan Survei, Evaluasi Kebijakan dan Penelitian Evaluasi: Handbook Analisis Kebijakan Publik*. Nusamedia.
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan publik. *Semarang: Widya Karya*, 323.
- Hanisy, A. (2013). Konsep dasar analisis kebijakan. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 4(1), 48-63.
- Iskandar, D. J. (2017). Pentingnya partisipasi dan peranan kelembagaan politik dalam proses pembuatan kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 14(1), 17-35.
- Kuswandro, W. E. (2024). *Kebijakan Publik Perspektif Politik: Advokasi Civil Society dan Kepartaian*. Universitas Brawijaya Press.
- Lele, G. (2024). *Kebijakan Publik Untuk Transformasi Sosial: Sebuah Pendekatan Kritis-Agonistik*. UGM PRESS.
- Mahardhani, A. J. (2018). Advokasi kebijakan publik.
- Malau, N. A., Kurniawan, A., Kusmendar, K., Widayati, T., Rozikin, I., Safii, M., ... & Adhania, L. S. O. (2024). *Kebijakan Publik*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Melati, T., & Asmorowati, S. (2023). Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Mendorong Inklusi Sosial: Tinjauan Dari Prespektif Kebijakan Publik. *Jurnal Darma Agung*, 31(3), 257-267.

- Muhammad, K., Firdaus, S. U., & La Aci, M. H. (2023). Kebijakan publik dan politik hukum: Membangun demokrasi berkelanjutan untuk masyarakat. *Sovereignty*, 2(4), 354-368.
- Nasihi, A., & Hapsari, T. A. R. (2022). Monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan. *Indonesian Journal of Teaching and Learning (INTEL)*, 1(1), 77-88.
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). Analisis Kebijakan Publik. *Makassar: Publisher UNM*.
- Page, E. C. (2018). Whatever governments choose to do or not to do. In *Handbook on Policy, Process and Governing* (pp. 16-31). Edward Elgar Publishing.
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33-37.
- Putri, D. S., Arsalan, H., & Ulfa, M. (2022). Partisipasi Publik Dalam Kebijakan Investasi Energi Terbarukan Di Indonesia: Perspektif Demokrasi Energi (Public Participation In Renewable Energy Investment Policy In Indonesia: A Democratic Energy Perspective). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(3), 473-491.
- Rahma, I. (2019). Partisipasi publik dan keterbukaan informasi dalam penyusunan kebijakan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(1), 80-95.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1-12.
- RAMUR, I. (2023). Analisis Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puuxviii/2020.
- Saggaf, S., Said, M. M., & Saggaf, W. S. (2018). *Reformasi Pelayanan Publik di Negara Berkembang* (Vol. 1). Sah Media.
- Subianto, A. (2020). Kebijakan publik: Tinjauan perencanaan, implementasi dan evaluasi.
- Suprayitno, D., Selvia, F., Suparyati, A., Heryani, A., Titalessy, P. B., Wicaksono, F., ... & Boari, Y. (2024). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Suryono, A. (2014). Kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 98-102.
- Suwitri, S. (2008). Konsep dasar kebijakan publik. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Ulum, M. C. (2018). *Public Service: Tinjauan Teoretis dan Isu-Isu Strategis Pelayanan Publik*. Universitas Brawijaya Press.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.
- Wibawa, K. C. S. (2019). Urgensi keterbukaan informasi dalam pelayanan publik sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 218-234.
- Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik era globalisasi*. Media Pressindo.
- Zulfikar, W., & Indrapradja, I. S. (2017). Formulasi Kebijakan Pendirian Lembaga Peradilan Khusus Hubungan Industrial Di Kabupaten Bekasi. *Creative Research Journal*, 3(01), 55-72.

PROFIL PENULIS



Rahmat Nurjaman, S.Sos., M.Si

Dosen Program Studi Manajemen Administrasi
Perkantoran

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Cenderawasih

Penulis lahir di Sungguminasa Kabupaten Gowa, 18 Agustus 1991. Penulis adalah Dosen tetap pada Program Studi Manajemen Administrasi Perkantoran, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih. Penulis Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Administrasi Negara di Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2014 dan melanjutkan S2 pada program Pascasarjana Jurusan Administrasi Pembangunan tahun 2016 di Universitas Hasanuddin Makassar dan menyelesaikan Pendidikan di tahun 2018 bergelar M.Si.

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

Buku Analisis Kebijakan Publik ini menawarkan pemahaman dasar tentang proses, metode analisis dan evaluasi kebijakan publik. Disusun secara sistematis, buku ini membahas tahapan dalam siklus kebijakan publik, mulai dari perumusan masalah, agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi, hingga evaluasi. Setiap tahap dibahas dengan pendekatan teoretis yang kuat, dikombinasikan dengan beberapa studi kasus nyata untuk memberikan gambaran praktis kepada pembaca.

Penulis menekankan pentingnya analisis kebijakan berbasis data dan bukti (*evidence-based policy*), serta menyoroti berbagai metode analisis, seperti analisis kualitatif, kuantitatif, hingga pendekatan pemodelan dan simulasi. Dengan demikian, pembaca diajak untuk tidak hanya memahami kebijakan dari sudut pandang prosedural, tetapi juga dari perspektif politik, sosial, ekonomi, dan etis yang memengaruhi proses pembuatan keputusan publik.

Bahasa yang digunakan dalam buku ini bersifat akademik namun tetap komunikatif, sehingga dapat diakses baik oleh mahasiswa, peneliti, maupun praktisi kebijakan. Secara keseluruhan, Analisis Kebijakan Publik menjadi referensi penting bagi siapa pun yang ingin memahami kompleksitas dunia kebijakan publik, sekaligus membekali diri dengan alat-alat analitis untuk terlibat secara aktif dan kritis dalam penyusunan, implementasi, maupun evaluasi kebijakan di era yang terus berubah ini.



IKAPI
INDONESIAN ASSOCIATION OF PUBLIC POLICY ANALYSTS

CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 896-5427-3996

